

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Saddam Maula Yunkaz, (2018): *PEMIKIRAN YUSRIL IHZA MAHENDRA  
TENTANG HUKUM TATA NEGARA  
PEMBERLAKUAN HUKUM  
ISLAM PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH***

Yusril Ihza Mahendra merupakan seorang pakar Hukum Tata Negara di Indonesia. Yusril Ihza Mahendra menilai agar adanya kajian ulang terhadap Hukum Positif yang dianut Indonesia. Pasalnya, ia percaya perlu adanya keseimbangan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Dalamnya.

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Pemiukirtan Yuasril Ihza Mahendra Tentang Konstruksi Hukum Tata Negara dalam pembverlakuan Huklum Islam dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap sistem yang dianut pemerintahan di Indonesisa.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, yang bersifat kualitatif.sumber data primer diperoleh dari informan melalui media digital yaitu berita online, wawancara, data skunder diperoleh dari buku dan sumber data tersier diperoleh dari kamus, jurnal, koran.

Eksistensi Hukum Islam diIndonesia dalamn sejarah menurut sebagaian ahli sejarah dimulai pada abad pertama hijriah atau pada abad sekitar ketujuhg dfan kedelapan masehi. Sebagai gerbang masuk kedalam kawasan nusantara kawasan utara pulau Sumatralaha yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Secara perlahan gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam Perata Peureukluk, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah Nusatara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusukl berdirinya kerajaan Samudra pasai di Aceh. Tidak jauh dari aceh berdiri kesultanan Malaka, lalu di Sulawwsi dan Maluku berdirinya kerajaan Gowa dan kesultanan Ternate serta Tidore. Kesultanan-kesultanan tersebut sebagai mana tercatat dalam sejarahi itu tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif setiap kesultanan tersebut tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam yang berlaku sebagai hukum positif. Penetapan hukum Islam sebagai Hukum positif setiap kesultanan tersebut tentu saja menguatkan pengalaman yang memang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat muslim itu. Fakta-fakta ini dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fiqih yang ditulis oleh para ulama nusantara pada abad-16 dan 17 dan kondisi itu terus berlangsung hingga para pedagang belanda datang di kawasan Nusantara.